

STRATEGI PENGEMBANGAN OBYEK WISATA PEDESAAN OLEH DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

IGIT RUSTOYO

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurang terciptanya keselarasan antara pihak pengelola obyek wisata atau masyarakat setempat dengan pihak pemerintah dan kurang optimalnya rencana strategis dalam pemerataan dan pembangunan kepariwisataan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Lamanya penelitian yang penulis lakukan yaitu 9 bulan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 13 orang. Teknik pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan dengan baik. 2) Adanya hambatan-hambatan seperti belum terbukanya masyarakat dan pengelola wisata setempat terhadap masuknya pihak swasta atau investor, belum adanya siteplan dan masterplan yang jelas dan terarah, dan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. 3) Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan komunikasi dan pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan antar pemangku kepentingan, melakukan pelatihan dan menambah jumlah anggaran setiap tahunnya untuk pengembangan pariwisata.

Kata Kunci : *Strategi, Pengembangan, Obyek Wisata, Pedesaan.*

A. PENDAHULUAN

Pengembangan obyek wisata menjadi alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memiliki peran yang sangat strategis dalam melaksanakan rencana strategi pengembangan obyek wisata pedesaan di daerah. Seharusnya Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dapat mengembangkan segala potensi wisata di daerahnya

terutama yang ada di pedesaan, sehingga dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat sekitar wisata.

Berdasarkan rencana strategi yang dirumuskan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, bahwa pengembangan pariwisata pada dasarnya bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan serta pemerataan pembangunan di bidang pariwisata;

2. Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang berkesinambungan sehingga memberikan manfaat sosial-budaya, sosial ekonomi bagi masyarakat dan daerah, serta terpeliharanya mutu lingkungan hidup;
3. Meningkatkan kepuasan wisatawan dan memperluas pangsa pasar; dan
4. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan pariwisata Indonesia sebagai berdayaguna, produktif, transparan dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat, dalam institusi yang merupakan amanah yang di pertanggungjawabkan.

Namun demikian berdasarkan hasil observasi awal bahwa strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal, hal ini dapat ditunjukkan dari adanya beberapa indikator masalah sebagai berikut :

1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan belum optimal dalam menyusun rencana strategis yang dapat terciptanya pemerataan pembangunan dan pengembanan pariwisata.
2. Masih kurangnya perhatian dalam upaya pengembangan dan mempertahankan kesenian dan kebudayaan lokal yang dimiliki.

3. Masih banyaknya obyek wisata pedesaan yang belum memberikan kenyamanan maupaun kepuasan kepada wisatawan dan masih kurangnya strategi promosi yang dilakukan.
4. Masih belum sepenuhnya tercipta keselarasan antara pihak pengelola obyek wisata atau masyarakat setempat dengan pemerintah dalam upaya pengembangan suatu obyek wisata.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Panandaran?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan obyek

wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, yaitu suatu metode untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti secara sistematis. Dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menyusun data secara sistematis kemudian disajikan dan dianalisis untuk mendapat pemecahan masalah.

Mengenai metode penelitian ini, sebagaimana menurut Martono (2015:197) metode deskriptif merupakan tipe penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini merupakan

penelitian lanjutan setelah kita melakukan penelitian eksploratif.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kabupaten Pangandaran. Adapun aspek kajian dalam penelitian ini adalah indikator yang membahas strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan 3 (tiga) tingkatan strategi menurut Sumarsana (2013:62) yaitu “strategi korporate (*corporate strategy*); strategi bisnis (*business strategy*); dan strategi operasional/fungsional (*operational/functional strategy*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 13 (tiga belas) informan, yaitu 6 (enam) orang pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan 7 (tujuh) orang yaitu pihak desa dan ketua pengelola obyek wisata pedesaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara studi kepustakaan, studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

C. LANDASAN TEORITIS

Sebagaimana menurut Muljono (2012:15) menyatakan bahwa secara eksplisit, strategi adalah rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas lain untuk menanggapi lingkungan dan membantu organisasi mencapai sasaran. Intinya

strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaing.

Sedangkan menurut Sumarsana (2013:62) bahwa tingkatan strategi dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu: (1) Strategi Korporat (*Corporate Strategy*); (2) Strategi Bisnis (*Business Strategy*); (3) Strategi Operasional/Fungsional (*Operational/Functional Strategy*).

Sebagaimana menurut Muljadi (2014:34) bahwa arah dan tujuan dari pembangunan kepariwisataan yaitu Pemanfaatan kebudayaan untuk kepariwisataan guna kepentingan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, persatuan dan kesatuan serta persahabatan antar bangs, pengembangan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan dan bertumpu pada budaya daerah, pesona alam, pelayanan prima, dan berdaya saing global.

Sebagaimana dijelaskan oleh *World Tourism Organization* (UN-WTO) dalam Pitana, (2009:113) bahwa: Peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat strategis dan bertanggungjawab dalam membangun kerangka (*framework*) operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya.

Menurut Muljadi (2016:81) bahwa: Kepariwisataan yang dikelola dengan baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan pada industri lokal lainnya untuk berperan dalam menyediakan barang dan jasa.

Selanjutnya Muljadi (2016:55) juga mengatakan bahwa: Produk pariwisata harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan produk jasa yang diperlukan oleh wisatawan dan bentuk menjadi satu bagian yang umumnya disebut paket wisata. Komponen dalam paket wisata tersebut merupakan terdiri dari pelayanan berbagai jasa yang harus dilaksanakan dengan baik.

Menurut Suryo Sakti (2012:77) mengatakan bahwa motivasi dilakukan pada pencarian sesuatu yang unik dan baru yaitu pencarian terhadap obyek-obyek dan daya tarik wisata yang unik dan baru, atau pencarian terhadap lokasi-lokasi baru lebih menantang untuk jenis atraksi yang diminati.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Damanik dan Weber (2006:16), bahwa pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan memiliki peran dalam menentukan kebijakan kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan pariwisata, kebijakan tersebut seperti kebijakan pemasaran, jaminan keamanan, pembebasan visa,

dukungan terhadap *event-event* budaya, standarisasi produk dan jasa wisata, sertifikasi kompetensi sumber daya manusia dan sebagainya.

Selanjutnya Pitana dan Gayatri (2005:95), bahwa peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan, investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.

Muljadi (2016:106), bahwa kegiatan promosi wisata pada umumnya dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan, antara lain: pemasangan iklan baik cetak maupun elektronik dan pada ruang terbuka, penerbitan bahan pemasara seperti: brosur, video *cassette*, dan mengikuti *event-event* promosi.

Sedangkan menurut Pitana dan Gayatri (2005:95), mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sebagai dinamisor agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatusimbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Selanjutnya menurut Pitana dan Giyatri (2005:95), bahwa peran pemerintah daerah adalah menyediakan

segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan, adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu swasta maupun masyarakat.

Sebagaimana menurut *World Tourism Organization* (UN-WTO) dalam Pitana, (2009:113), bahwa : Peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat stretegis dan bertanggungjawab terhadap pembangunan kepariwisataan, dengan membangun dan memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menjamin pendidikan dan pelatihan yang profesional untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata.

Selanjutnya Suryo Sakti (2012 :90), bahwa pengembangan produk pariwisata pedesaan perlu mempertimbangkan kesinambungan dan kelestarian sumber daya wisata yang dikembangkan baik sumber daya wisata alam maupun budaya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pedesaan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Menurut Sumarsana (2013:62) terdapat 3 (tiga) tingkatan strategi yaitu: (1) Strategi Korporat (*Corporate Strategy*); (2) Strategi Bisnis (*Business Strategy*); (3) Strategi

Operasional/Fungsional
(*Operational/Functional Strategy*).

Berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian dapat diketahui bahwa strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan di kecamatan parigi kabupaten pangandaran dari 12 indikator dalam strategi pengembangan, 5 indikator telah dilaksanakan dengan baik dan 7 indikator dilaksanakan dengan kurang baik, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Strategi Korporat (*Corporate Strategy*);

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam mempertahankan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan keunikan yang dimiliki oleh setiap obyek wisata; mendorong setiap pengelola obyek wisata agar lebih kreatif dalam mengemas produk pariwisata; dan mendorong masyarakat, kompepar ataupun karang taruna agar lebih menggali potensi wisata yang lain di sekitar obyek wisata yang sudah ada. Dengan melakukan pendataan dan repitalisasi serta memberikan pembinaan dan fasilitasi alat-alat kesenian, sehingga kesenian-kesenian yang mulai terlupakan dapat dibangkitkan kembali, memberikan dorongan melalui aktivitas program pelatihan mengenai keterampilan dalam mengemas produk pariwisata, dan memberikan motivasi kepada pengelola wisata dan masyarakat setempat untuk menggali setiap potensi

wisata lain di sekitar obyek wisata yang sudah ada.

Sebagaimana menurut Muljadi (2014:34), bahwa : Arah dan tujuan dari pembangunan kepariwisataan yaitu Pemanfaatan kebudayaan untuk kepariwisataan guna kepentingan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, persatuan dan kesatuan serta persahabatan antar bangs, pengembangan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan dan bertumpu pada budaya daerah, pesona alam, pelayanan prima, dan berdaya saing global.

Sedangkan, Muljadi (2016 : 55), juga mengatakan bahwa produk pariwisata harus dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan produk jasa yang diperlukan oleh wisatawan dan bentuk menjadi satu bagian yang umumnya disebut paket wisata. Komponen dalam paket wisata tersebut merupakan terdiri dari pelayanan berbagai jasa yang harus dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya masih menurut Suryo Sakti (2012 :77), mengatakan bahwa “motivasi dilakukan pada pencarian sesuatu yang unik dan baru yaitu pencarian terhadap obyek-obyek dan daya tarik wisata yang unik dan baru, atau pencarian terhadap lokasi-lokasi baru lebih menantang untuk jenis atraksi yang diminati.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa indikator mempertahankan nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan keunikan yang dimiliki oleh setiap obyek wisata,

mendorong setiap pengelola obyek wisata agar lebih kreatif dalam mengemas produk pariwisata, dan mendorong masyarakat, kompepar atau karang taruna agar lebih menggali potensi wisata lain di sekitar obyek wisata yang sudah ada dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selanjutnya dalam menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya pengembangan potensi obyek wisata, dan memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja di sekitar obyek wisata sangat diperlukan, karena dengan bekerjasama atau memitrakan pihak swasta dalam pengembangan obyek wisata tentu akan mempercepat dalam melakukan pengembangan wisata selain itu dapat menciptakan lapangan kerja baru disekitar obyek wisata.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh *World Tourism Organization* (UN-WTO) dalam Pitana, (2009: 113) bahwa peran pemerintah dalam menentukan kebijakan pariwisata sangat stretegis dan bertanggungjawab dalam membangun kerangka (*framework*) operasional dimana sektor publik dan swasta terlibat dalam menggerakkan denyut pariwisata, menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan legislasi, regulasi, dan kontrol yang diterapkan dalam pariwisata, perlindungan lingkungan, dan pelestarian budaya serta warisan budaya.

Menurut Muljadi (2016 : 81), bahwa: Kepariwisatan yang dikelola

dengan baik dan berkelanjutan seharusnya mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata akan juga memberikan kesempatan pada industri lokal lainnya untuk berperan dalam menyediakan barang dan jasa.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa indikator manjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya pengembangan obyek wisata dan memperluas dan pemeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja di sekitar obyek wisata dilaksanakan dengan kurang baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Strategi Bisnis (*Business Strategy*);

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam memperluas dan meningkatkan kegiatan promosi wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Travel Agent, media cetak maupun elektronik, kelompok sadar wisata dan perusahaan rumah makan dan hotel serta pemanfaatan media sosial.

Sebagaimana menurut Muljadi (2016:106), bahwa kegiatan promosi wisata pada umumnya dilakukan melalui beberapa jenis kegiatan, antara lain: pemasangan iklan baik cetak maupun elektronik dan pada ruang terbuka, penerbitan bahan pemasara seperti: brosur, video *cassette*, dan mengikuti *event-event* promosi.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa indikator memperluas dan meningkatkan kegiatan promosi wisata telah dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selanjutnya dalam pengembangan obyek wisata bahwa meningkatkan kreatifitas penyelenggaraan *event-event* atau festival yang dilakukan di setiap kawasan wisata, melakukan promosi potensi wisata dan produk wisata kepada investor agar mau menanamkan modalnya dalam pengembangan wisata pedesaan yang ada di kecamatan parigi, dan membangun iklim yang kondusif dengan pengelola wisata dan masyarakat dalam hal penanaman modal sangatlah penting dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku organisasi pemerintah. Karena dengan membangun iklim yang kondusif antar pemangku kepentingan dapat menarik minat investor untuk menamakan modalnya.

Sebagaimana dikemukakan Pitana dan Gayatri (2005 : 95), mengungkapkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran sebagai dinamisator agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergikan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Menurut Damanik dan Weber (2006:16) bahwa pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan memiliki peran dalam menentukan kebijakan kegiatan-kegiatan yang mendukung perkembangan pariwisata, kebijakan tersebut seperti kebijakan pemasaran, jaminan keamanan, pembebasan visa, dukungan terhadap *event-event* budaya, standarisasi produk dan jasa wisata, sertifikasi kompetensi sumberdaya manusia dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa indikator meningkatkan kreatifitas penyelenggaraan *event-event* atau festival, melakukan promosi potensi wisata dan produk wisata kepada investor, dan membangun iklim yang kondusif dengan pengelola wisata dan masyarakat setempat dalam hal penanaman modal dilaksanakan dengan kurang baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

3. Strategi Operasional/ Fungsional (Operational/ Functional Strategy);

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam pengembangan obyek wisata Dinas Pariwisata dan Kenudayaan haruslah melaksanakan pemberdayaan terhadap petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pariwisata dan Kebudayaan Kecamatan, pengelola pariwisata dan masyarakat setempat dalam mengelola obyek wisata pedesaan dan menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang kemudahan kegiatan pariwisata sehingga memberikan rasa

nyaman kepada wisatawan yang berkunjung.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muljadi (2016:86), bahwa untuk meningkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan secara profesional di bidang kepariwisataan, perlu dikembangkan model pendidikan dan pelatihan dengan memberikan fasilitas fisik dan non fisik dan memanfaatkan IPTEK.

Menurut Muljadi (2016:48) bahwa pembangunan pariwisata dilakukan oleh para pelaku utama antara lain usaha pariwisata, masyarakat dan pemerintah, usaha pariwisata dan masyarakat adalah merupakan pelaku-pelaku langsung, sedangkan pemerintah berperasn sebagai fasilitator atau pemicu dalam kegiatan pariwisata.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa indikator menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang kemudahan kegiatan pariwisata dan melaksanakan pemberdayaan terhadap petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pariwisata dan Kebudayaan, pengelola wisata dan masyarakat setempat dalam mengelola obyek wisata pedesaan dilaksanakan dengan kurang baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Selanjutnya dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat agar ikut menjaga kebersihan dan keamanan serta melestarikan kawasan wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan pengarah dan sosialisasi kepada masyarakat dan

pengelola wisata, pembentukan satgas sapta pesona dan fasilitasi penanaman dan pelestarian lingkungan hutan di kawasan wisata.

Sebagaimana dikemukakan Muljadi (2016:125) mengatakan bahwa terdapat tiga unsur dari sapta pesona sebagai salah satu daya tarik wisata yang dapat mempengaruhi keinginan wisatawan untuk berkunjung, unsur tersebut meliputi keamanan, ketertiban dan kebersihan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa indikator menumbuhkan kesadaran masyarakat setempat agar ikut menjaga kebersihan dan keamanan serta melestarikan kawasan wisata dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pedesaan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diantaranya:

1. Belum terbukanya masyarakat dan pengelola wisata setempat terhadap masuknya pihak swasta maupun investor dalam pengembangan obyek wisata;
2. Belum adanya siteplan atau *masterplan* yang jelas dan terarah

untuk dapat ditawarkan kepada penanam modal;

3. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengembangan obyek wisata seperti pembiayaan untuk penyelenggaraan *event* atau festival sebagai ajang promosi serta pembinaan kepada seniman dan budayawan fasilitasi penunjang kemudahan kegiatan wisata.

3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pedesaan Oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat diketahui upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diantaranya:

1. Dengan meningkatkan komunikasi dan pendekatan-pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan antar pemangku kepentingan guna menciptakan iklim yang kondusif dalam segala hal melalui peningkatan koordinasi dan konsolidasi serta musyawarah secara rutin.
2. Melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada;
3. Melakukan pelatihan dan peningkatan intensitas keterlibatan

masyarakat dalam manajemen pengembangan wisata dan penambahan jumlah anggaran setiap tahunnya untuk pengembangan pariwisata.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya mengenai strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengolahan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran pada dasarnya belum dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya indikator yang belum dilaksanakan dengan baik yaitu dari 12 indikator yang ada terdapat 7 indikator yang dilaksanakan dengan kurang baik dan 5 indikator diantaranya telah dilaksanakan dengan baik. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah berupaya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, namun untuk pengembangan obyek wisata pedesaan di Kecamatan Parigi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik, hal ini dikarenakan Dinas Pariwisata dan

Kebudayaan belum mampu sepenuhnya melaksanakan tingkatan strategi, yang terdiri dari Strategi Korporat (*Corporate Strategy*), Strategi Bisnis (*Business Strategy*), dan Strategi Operasional/Fungsional (*Operational/Functional Strategy*).

2. Berdasarkan pengolahan hasil wawancara dan observasi dapat diketahui bahwa Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yaitu belum terbukanya masyarakat dan pengelola wisata setempat terhadap masuknya pihak swasta maupun investor dalam pengembangan obyek wisata, selain itu belum adanya site plan atau master plan yang jelas dan terarah untuk dapat ditawarkan kepada penanam modal, keterbatasan anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengembangan obyek wisata seperti pembiayaan untuk penyelenggaraan *event* atau festival sebagai ajang promosi serta pembinaan kepada seniman dan budayawan serta untuk penyediaan berbagai fasilitas penunjang kemudahan kegiatan wisata dan sumber daya manusia.
3. Berdasarkan pengolahan hasil wawancara dan observasi dapat

diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam strategi pengembangan obyek wisata pedesaan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yaitu dengan meningkatkan komunikasi dan pendekatan-pendekatan kemasyarakatan dan pendekatan antar pemangku kepentingan guna menciptakan iklim yang kondusif dalam segala hal melalui peningkatan koordinasi dan konsolidasi serta musyawarah secara rutin guna membicarakan tentang pengembangan pariwisata, melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang sudah ada, melakukan pelatihan dan peningkatan intensitas keterlibatan masyarakat dalam manajemen pengembangan wisata dan penambahan jumlah anggaran setiap tahunnya untuk pengembangan pariwisata.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu :

1. Dalam pelaksanaan strategi pengembangan obyek wisata pedesaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, maka diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan komunikasi terhadap Kompepar, masyarakat

- dan pengelola wisata agar mampu meningkatkan kualitas pengemasan produk pariwisata dan fasilitasi peningkatan peran organisasi masyarakat (Pokdarwis/Kompepar) dalam pembangunan pariwisata, menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja di sekitar obyek wisata, dan meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait dan penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sector pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal.
2. Untuk meminimalisir timbulnya hambatan-hambatan di kemudian hari maka sebaiknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan lebih fokus terhadap indikator-indikator yang masih kurang dalam pelaksanaannya seperti meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kemudahan kegiatan pariwisata serta melakukan pemberdayaan kepada pengelola wisata dan masyarakat setempat, meningkatkan kreatifitas penyelenggaraan *event-event* atau festival di setiap kawasan wisata serta melakukan promosi potensi wisata kepada investor dan membangun iklim yang kondusif dengan pengelola wisata, masyarakat dan kelompok-kelompok lain.
 3. Selain upaya yang telah dilakukan, maka sebaiknya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan upaya lain, seperti meningkatkan efektifitas kemitraan dan koordinasi antar pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi dan sosial lainnya terutama yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan pariwisata serta menambah jumlah anggaran yang diajukan tiap tahun kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah dan meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam dan di luar negeri, dan pengembangan kerjasama antar *stakeholder* dalam pembangunan kepariwisataan dengan meningkatkan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, dan F. Weber. 2006 .
Perencanaan Ekowisata.
Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Gede, I Pitana., dan Ketut, I Surya
Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu
Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit
ANDI.

Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial (Konsep-Konsep Kunci)*. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Muljadi, dan Warman, Andri. 2014. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta. Rajawali Pers.

Muljono, Djoko. 2012. *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: Penerbit ANDI

Sakti, Suryo Hadiwijoyo. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sumarsana, Thomas. 2013. *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep, Aplikasi, Dan Pengukuran Kinerja*, Edisi 2. Jakarta: Indeks.